Perihal: Permohonan Pasang Baru Listrik

Kepada: Yth.

NPimpinan PT. PLN (PERSERO)

Di Purwodadi

Dengan ini saya mengajukan permohonan Pasang listrik baru untuk " CV. BUNDA ARTHA JAYA " yang beralamat di JI A.YANI RT 3 RW 15 KURIPAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN GROBOGAN DENGAN DAYA B.66.000 Sebagai pertimbangan saya lampirkan:

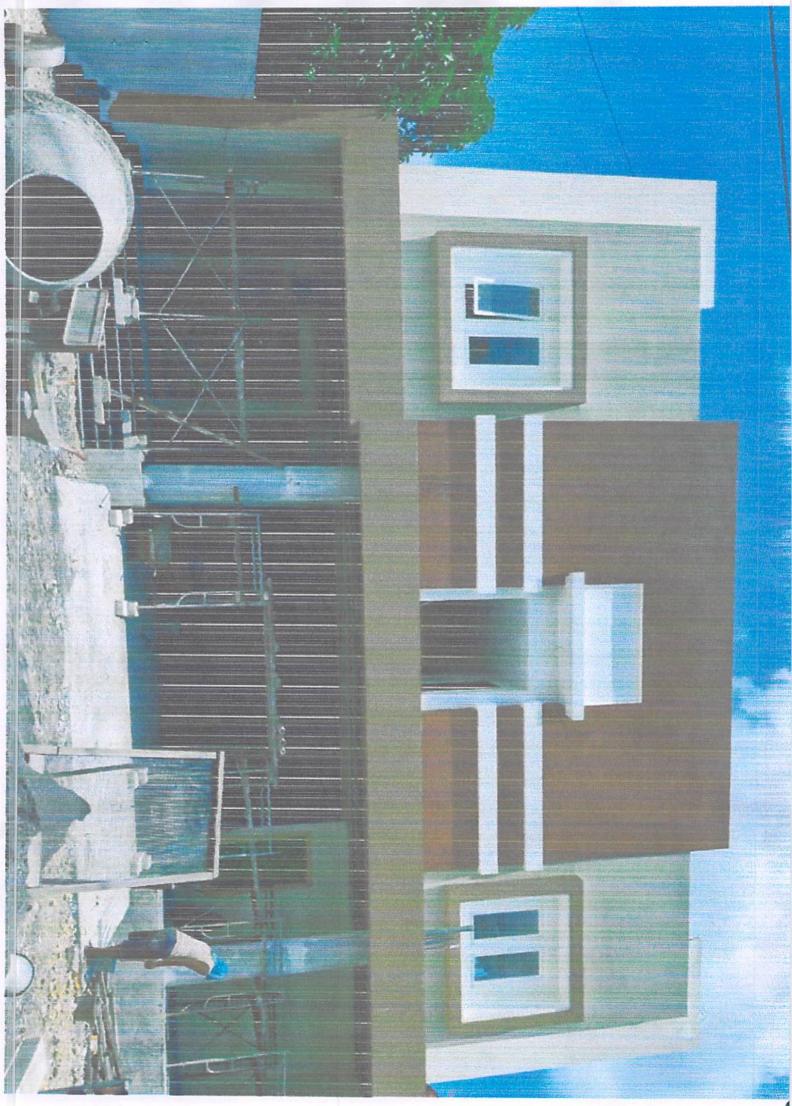
- 1. Surat permohonan
- 2. Foto copy KTP pemohon
- 3. Foto lokasi

4.08 95 297 4 3322

Demikian surat permohonan ini sayabuat agarbisajadi pertimbanganbapak/ibu pimpinan PT.PLN (PERSERO) di tempat. Atas perhatiannya sayaucapkanterimakasih.

Purwodadi 19 Maret 2024

(Suryanto)



## PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS

NIK

: 3314052317600007

NAMA TANTIANDREANI
Tempat/TgiLahir LASEM. 13-11-1960
Jenis Kelamin PEREMPUAN Gol Darah
Alamat JL A YANI 121
RT/RW 006 / 003
Kel/Desa PANJUNAN
Kecamatan KOTA KUDUS
Agama BUDHA
Status Perkawinani: KAWIN
Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewanganegaraan: WNI
Berlaku Hingga 13-11-2017 Nama Tempat/Tgl Lahir Jenis Kelamin Alamat RT/RW Kel/Desa Kecamatan Aoama

Gol Darah



# PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS

Gol. Darah : O

NIK

: 3319022007580001



KUDUS 11-05-2021





NPWP16: 0127 8373 5950 6000 CV. BUNDA ARTHA JAYA

A YANI BLOK. - NO. 121 RT. 006 RW. 003 PANJUNAN, KOTA KUDUS KAB. KUDUS JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 12/03/2024





KPP PRATAMA KUDUS



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303240019437

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No		Judul KBLI	London Obana	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	55120		Jalan Jenderal Achmad Yani, Desa/Kelurahan Kuripan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 58112	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.

4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokurnen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tenggung jawab Pelaku Usaha.



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303240019437

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

3. Status Penanaman Modal

2. Alamat Kantor

No. Telepon

Email

: CV BUNDA ARTHA JAYA

: JL. A YANI 121, Desa/Kelurahan Panjunan, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus,

Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 59317 0811298955

bundaarthajaya@gmail.com

**PMDN** 

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha

: Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Maret 2024

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2024

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang dilerbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

